

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik memainkan peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, baik dari segi kebijakan, perencanaan, maupun implementasi program-program publik yang menyentuh kehidupan masyarakat. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi pedoman utama untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. SDG 11 tentang "Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan" dan SDG 12 tentang "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab" menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang buruk dapat berdampak pada kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan, yang semuanya menjadi tantangan besar dalam konteks administrasi publik.

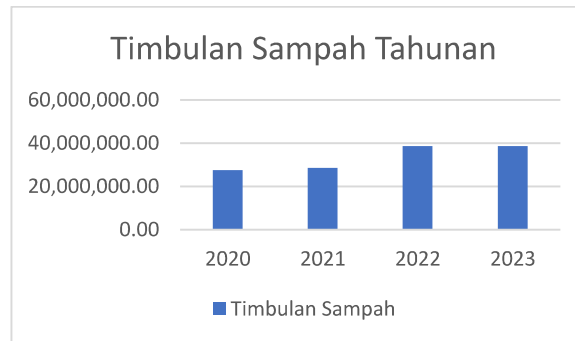
Salah satu aspek penting dalam administrasi publik merupakan manajemen publik, yang berperan dalam mengkoordinasi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Manajemen publik mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang berbasis pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Melalui manajemen publik yang baik, diharapkan pemerintah dapat mengelola sumber daya dengan optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, manajemen publik menjadi sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks di tingkat lokal.

Dalam manajemen publik, pentingnya sinergitas antara berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan menjadi salah satu tantangan di dalamnya. Sinergitas ini mencakup kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang masing-masing memiliki peran dan kepentingan yang berbeda. Menurut Friedrich (2015), sinergitas antar *stakeholders* merupakan faktor kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, tanpa adanya sinergitas yang efektif, kebijakan yang diimplementasikan cenderung tidak mencapai hasil yang optimal atau bahkan gagal di lapangan. Dalam persoalan pengelolaan sampah, *stakeholder* yang terlibat di antaranya ialah Dinas Lingkungan Hidup, mitra, dan masyarakat.

Pentingnya sinergitas dalam manajemen publik terlihat jelas dalam berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu isu lingkungan yang membutuhkan kerja sama antar berbagai pihak adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di lingkungan menjadi persoalan yang kian mendesak seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi dengan cepat di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta swasta sangat diperlukan untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan (Lingga et al., 2024).

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan berkelanjutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan terus berkembangnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat, volume sampah di kota-kota besar semakin meningkat, sementara kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah

seringkali tidak memadai. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya sinergitas antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, sinergitas antar *stakeholders* menjadi sangat penting agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Sari & Widodo, 2021).



Gambar 1. 1 Jumlah Timbulan Sampah

Sumber : SIPSN, 2024

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir total timbulan sampah di Indonesia mengalami peningkatan terus menerus, yakni pada tahun 2020 sebanyak 27,5 juta ton, dan kemudian naik pada tahun 2021 menjadi 28,5 juta ton. Kemudian pada 2022 naik menjadi 38,63 juta yang kemudian naik lagi menjadi 38,64 juta ton per tahun pada 2023. Peningkatan timbulan sampah tersebut tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang besar dan terus mengalami peningkatan, ditambah dengan tempat pembuangan ataupun pengelolaan sampah yang terbatas jumlahnya dan minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan tantangan signifikan dalam pengelolaan sampah. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman terkait pentingnya melakukan pemilahan sampah serta melakukan pembuangan sampah

pada tnpatnya (Lingga et al., 2024). Berikut tabel 1.1 data provinsi penghasil timbulan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2023.

Tabel 1. 1 provinsi penghasil samph terbesar di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah timbulan sampah
1	Jawa Timur	6.117.220
2	Jawa Tengah	5.372.159
3	Jawa Barat	4.782.722
4	DKI Jakarta	3.141.650
5	Banten	2.037.973

Sumber: SIPSN, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut yang dihimpun dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dapat terlihat bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia Pada tahun 2023 dengan jumlah timbulan sampah sebesar 5,73 juta ton per tahun. Provinsi Jawa Tengah memegang posisi kedua setelah Provinsi Jawa Timur yang menduduki posisi pertama, yang kemudian diikuti posisi ketiga hingga posisi kelima yang berturut-turut diisi oleh Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dengan baik dan berwawasan lingkungan. Hal tersebut mencakup penyediaan sarana prasarana yang memadai, layanan pengelolaan sampah yang efisien, serta edukasi kepada masyarakat terkait praktik pengelolaan sampah yang baik. Meskipun regulasi telah ditetapkan, implementasi peraturan tersebut masih belum optimal di banyak daerah. Sistem pemilahan sampah di Indonesia belum diterapkan dngan cara luas serta konsisten. Sebagian besar masyarakat masih belum memilah sampah mreka sebelum dibuang (Tania &

Dompak, 2024). Berikut merupakan data timbulan sampah tahunan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 2 Data Timbulan Sampah Tahunan Provinsi Jawa Tengah Per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahunan(ton)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banyumas		195,357.75	195,964.49	197,758.42
2	Kab. Batang	87,788.12	118,317.38	207,055.41	
3	Kab. Blora	135,568.25	82,801.58	139,811.75	141,433.02
4	Kab. Boyolali	105,094.61	106,159.34	106,781.29	108,373.66
5	Kab. Brebes	361,123.52	358,865.26	366,937.60	366,937.60
6	Kab. Cilacap	343,019.17	344,409.04	347,055.78	348,406.57
7	Kab. Demak		263,666.36	263,666.36	267,884.52
8	Kab. Grobogan			310,021.75	315,050.32
9	Kab. Jepara	254,418.30	195,357.75	150,516.42	154,571.51
10	Kab. Karanganyar		132,071.89	137,065.97	
11	Kab. Kebumen			169,013.40	176,363.85
12	Kab. Kendal	148,701.73		149,652.92	153,796.40
13	Kab. Klaten		215,458.83	234,703.44	237,050.70
14	Kab. Kudus	160,924.12		163,578.95	159,061.34
15	Kab. Magelang	248,530.33	248,800.43		241,767.97
16	Kab. Pati	239,060.58	241,664.31	246,223.89	251,092.63
17	Kab. Pekalongan		141,447.87	142,569.58	144,022.43
18	Kab. Pemalang	142,970.65	214,837.39	216,694.51	
19	Kab. Purbalingga		184,585.06	186,120.80	
20	Kab. Purworejo	105,146.86	105,420.18	105,694.22	117,432.91
21	Kab. Rembang		89,666.36	92,026.00	92,770.06
22	Kab. Semarang	194,690.09	192,189.00	193,421.53	194,601.94
23	Kab. Sragen	195,023.44	213,952.27	215,417.38	217,301.22
24	Kab. Sukoharjo	132,863.50	131,200.56	132,101.09	133,114.77
25	Kab. Tegal	371,778.31	244,819.49	306,466.23	220,493.69
26	Kab. Temanggung	181,143.80	182,562.96	146,050.37	147,357.80
27	Kab. Wonogiri	159,663.85	160,369.61	126,917.85	127,999.02
28	Kab. Wonosobo	128,352.10	132,496.46	133,682.56	132,810.94
29	Kota Magelang	32,709.11	29,447.93	29,384.62	29,400.33
30	Kota Salatiga	41,620.01	40,969.24	41,668.28	42,496.23
31	Kota Semarang	466,010.79	430,749.75	431,085.22	431,534.65
32	Kota Surakarta			137,345.45	152,974.67
33	Kota Tegal		73,573.52	79,365.97	68,300.63

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Boyolali masih mengalami kenaikan timbulan sampah sepanjang 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020 sebesar 105,094.61 ton, kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 106,159.34 ton. Kemudian pada 2022 naik menjadi 106,781.29 ton dan yang terakhir pada 2023 menjadi 108,373.66 ton/tahun. Pola kenaikan timbulan sampah di Kabupaten Boyolali selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat dengan cara konsisten. Kenaikan tersebut tidak menunjukkan lonjakan yang tajam, yang menandakan bahwa faktor penyebabnya stabil, yaitu pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali yang cenderung meningkat dan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, terdapat peningkatan yang relatif konsisten setiap tahunnya, meskipun dalam angka absolut mungkin bervariasi. Pola konsisten ini menunjukkan bahwa masalah pengelolaan sampah perlu perhatian yang terus-menerus dan berkelanjutan agar tidak semakin memburuk. Kabupaten Boyolali menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang hingga kini masih dihadapkan dengan persoalan sampah. Dengan jumlah penduduk sebesar 1.090.131 jiwa pada tahun 2023, Kabupaten Boyolali menghasilkan timbulan sampah sebesar 108,373.66 ton/tahun.

Peningkatan timbulan sampah tersebut selain karena adanya peningkatan jumlah penduduk, juga dipengaruhi oleh banyaknya industri yang membuka investasi di Kabupaten Boyolali. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zahro et al. (2022) yang menyatakan bahwa setiap tahunnya, produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya perumahan serta berbagai industri yang membuka investasi di Kabupaten yang dikenal dengan sebutan “Kota

Susu” ini. Banyaknya industri yang terdapat di Kabupaten Boyolali meningkatkan volume sampah karena pembukaan industri tersebut menyerap tenaga kerja yang menyebabkan jumlah penduduk mengalami kenaikan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, konsumsi barang dan jasa juga meningkat karena setiap individu menghasilkan sampah, baik dari makanan, kemasan, maupun produk sehari-hari.

Berdasarkan Data dari BPS pada tahun 2023, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali adalah 0,95%, lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah, yaitu 1,00% dan juga lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara keseluruhan, yaitu 1,13%. Meskipun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Boyolali lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan pusat, namun laju pertumbuhan di Kabupaten Boyolali cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2022 0,92% dan pada tahun 2023 naik menjadi 0,95%. Kenaikan laju pertumbuhan penduduk, meskipun kecil, dapat meningkatkan jumlah timbulan sampah karena penambahan penduduk dapat berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kenaikan timbulan sampah tahunan di Kabupaten Boyolali, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 106,781.29 ton dan naik pada tahun 2023 menjadi 108,373.66 ton/tahun.

Meskipun beberapa Kabupaten juga mengalami peningkatan timbulan sampah, namun Kabupaten Boyolali menjadi sorotan karena ketidakseimbangan antara sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Produksi sampah harian di Kabupaten Boyolali diperkirakan mencapai 300 ton,

dengan sekitar 60% di antaranya tidak tertangani dengan baik dan dibuang sembarangan, termasuk dibuang di sungai (Radar Solo, 2021)¹.

Jika infrastruktur pengelolaan sampah tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, akan sulit untuk menangani volume sampah yang bertambah. Kabupaten Boyolali mengalami *over capacity* pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winong, yakni kapasitas TPA Winong hanya sebesar 100 ton, namun timbulan sampah harian di Boyolali pada tahun 2023 berdasarkan data SIPSN mencapai 296 ton per hari seperti yang bisa dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Timbulan sampah harian Kabupaten Boyolali 2019-2023

Tahun	Timbulan sampah harian (Ton)	Kapasitas TPA (Ton)
2023	296,91	100
2022	292,55	100
2021	290,85	100
2020	287,93	100
2019	265,90	100

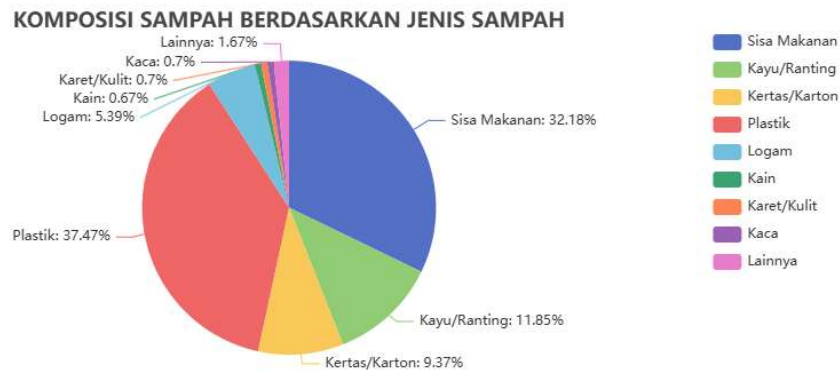
Sumber : SIPSN, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa TPA di Boyolali tidak mampu lagi menampung produksi sampah harian di Boyolali yang mana kapasitas TPA hanya sebesar 100 Ton, sedangkan jumlah timbulan sampah harian di Boyolali lebih dari kapasitas tersebut, yaitu di tahun 2023 mencapai 296,91 ton per hari. Dikutip dalam DetikJateng pada tahun 2024, produksi sampah di Boyolali saat ini diperkirakan mencapai sekitar 300 ton per hari. Dari jumlah tersebut yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya sepertiganya atau sekitar 100 ton per hari. Dari 100 ton tersebut, 35-40 ton bersumber dari layanan mandiri masyarakat yang bermitra dengan DLH. Kepala DLH Boyolali menyatakan bahwa

¹ <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/841674217/60-persen-sampah-di-boyolali-tak-masuk-tpa-dibuang-sembarang-hingga-sungai>

saat ini sampah yang ditangani pihaknya sebanyak 58 persen, yang mana untuk 42 persennya belum terkelola serta teridentifikasi. Beliau menuturkan bahwa dari sebanyak 300 ton sampah per hari tersebut, tidak mungkin semuanya dibawa ke TPA Winong sebab kemampuan TPA Winong hanya sepertiga dari produk sampah tersebut.

Meskipun bukan kota besar seperti Semarang, Boyolali mengalami urbanisasi cepat dan pertumbuhan ekonomi yang turut menyebabkan kenaikan timbulan sampah. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah mengeluarkan Perda tentang Pengelolaan sampah sejak tahun 2021, namun persoalan sampah di Kabupaten Boyolali masih belum tertangani di mana berdasarkan tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa sejak tahun 2021 timbulan sampah harian di Kabupaten Boyolali masih mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan kapasitas TPA yang masih *over capacity*.



Gambar 1. 2 Komposisi sampah berdasarkan jenis sampah

Sumber : SIPSN, 2024

Berdasarkan gambar 1.2 komposisi sampah di Kabupaten Boyolali tahun 2023, diketahui bahwa sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari aktivitas rumah tangga, yaitu berupa plastik (37,47%) dan sisa makanan (32,18%), yang

secara keseluruhan mencapai hampir 70% dari jumlah seluruh sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga memegang peran dominan dalam timbunan sampah daerah, sehingga menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian untuk mengembangkan langkah-langkah pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, studi oleh Amir et al. (2025) di Indonesia menunjukkan bahwa rumah tangga merupakan elemen fundamental dalam strategi pengelolaan sampah kota, karena mereka secara rutin menghasilkan dan membuang sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif harus dimulai dari rumah tangga, dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mendaur ulang sampah sejak dari sumbernya.

Di Kabupaten Boyolali, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah daerah, tantangan pengelolaan sampah rumah tangga masih memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, sinergitas antar *stakeholders* sangat penting untuk memastikan pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif dan berkelanjutan. Najiyati & Susilo (2011) mengartikan sinergitas *stakeholders* sebagai suatu kombinasi unsur-unsur, serta bagian yang dapat menghasilkan *output* atau keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sinergitas antar *stakeholders*, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha adalah kunci dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurut Hawken (1993), pengelolaan lingkungan yang baik bergantung pada keterlibatan semua pihak dalam sistem ekologi yang saling terkait. Hawken menekankan pentingnya kerja sama antar sektor untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah.

Najiyati & Susilo (2011) menyatakan bahwa proses sinergitas terjadi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar *stakeholders*. Kunci berhasilnya sinergi menurut Rhodes (2007) dapat dilihat dari 3 aspek mendasar, yaitu pemecahan masalah, peran pemerintah, dan jaringan komunikasi. Menurut Doctoroff (1977), terdapat sejumlah aspek bagi suatu sistem sinergi sehingga dapat dikatakan sebagai sinergi yang ideal, yaitu komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali diperlukan komunikasi dan koordinasi antar *stakeholders*. Hal tersebut bersadarkan pada pendapat ketiga ahli tersebut yang menyebutkan bahwa komunikasi merupakan salah satu aspek dalam mencapai sinergitas. Kemudian menurut Hasan (2005), dalam komunikasi dibutuhkan koordinsi, yang mana sejalan dengan pendapat Najiyati & Susilo (2011) yang menyatakan bahwa sinergitas dapat terbangun mellaui komunikasi dan koordinasi.

Pentingnya sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan smpah di Kabupaten Boyolali juga sesuai dengan pasal 10 dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan sampah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Bidang pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH Boyolali, yakni Bapak Sarju menyatakan bahwa DLH Boyolali melakukan sinergitas dengan mitra dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali.

Akan tetapi, komunikasi dan koordinasi antara DLH dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah masih kurang, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, meskipun sarana sudah disediakan. Hal tersebut didasarkan pada pernyataan Kepala DLH Boyolali yang dikutip dari (detikJateng, 2024)². Beliau menyatakan bahwa masyarakat sendiri masih banyak yang membuang sampah sembarangan di mana contohnya, yakni di Alun-alun Boyolali pada setiap malam, khususnya di akhir pekan masih banyak ditemukan sampah sisa bungkus makanan dan botol plastik berserakan di mana-mana padahal di lokasi tersebut sudah disediakan tempat sampah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan komunikasi dalam menyampaikan edukasi dan tanggung jawab kepada masyarakat.



Gambar 1. 3 Kondisi di sekitar jembatan Desa Jembungan, Boyolali

Sumber: Radar Solo, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat masih membuang sampah sembarangan meskipun telah ada spanduk larangan membuang

² <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7401735/produksi-sampah-boyolali-300-ton-per-hari-hanya-sepertiga-yang-bisa-ditampung>

sampah di sungai setempat. Hal tersebut menunjukkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya edukasi dari DLH terkait pengelolaan sampah. Keberadaan titik ilegal pembuangan sampah tersebut mengindikasikan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Sampah dari titik pembuangan sampah ilegal tersebut akhirnya dibawa ke TPA Winong, yang semakin memperburuk kapasitas TPA.

Selain itu, kurangnya interaksi antara masyarakat rumah tangga dan DLH terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program DLH dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah dimana sampah yang dibawa ke TPA masih dalam kondisi belum dipilah. Padahal menurut DLH, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, yakni masyarakat sebagai penghasil wajib memilah sampah, sedangkan pemerintah bertugas mengambilnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala DLH Boyolali yang menyatakan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah. Masyarakat sebagai penghasil sampah seharusnya memilah, kemudian pemerintah mengambil dan memusnahkannya. Pernyataan tersebut didukung dengan gambar 1.4 di bawah yang menunjukkan bahwa pekerja masih melakukan pemilahan sampah di TPA Winong mengingat sampah yang dibawa ke TPA masih berupa campuran atau belum dilakukan pemilahan.



Gambar 1. 4 Pekerja sedang memilah sampah di TPA

Sumber : Joglosemar news, 2024

Pihak DLH juga berharap terdapat kesadaran dari masyarakat dalam ikut mengelola sampah. Akan tetapi, komunikasi antara DLH Boyolali dan masyarakat masih kurang karena DLH tidak memiliki kepanjangan tangan untuk melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah secara langsung ke masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan Kabid Pengelolaan Sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH Boyolali yang menyatakan bahwa DLH sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah tidak memiliki kepanjangan tangan untuk melakukan pengarah dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah sehingga harus melalui OPD lain, yakni Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan sampah melalui sanitarian yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan yang ada di setiap kecamatan. Mengingat penyampaian informasi dilakukan melalui pihak ketiga maka komunikasi yang terjadi menjadi kurang efektif karena penyampaian informasi tidak secara langsung kepada yang bersangkutan. Komunikasi yang terjalin dengan jelas dan transparan dapat mengurangi

misinformasi serta meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Darmawan & Setiawan, 2018).

Sinergi yang dikerjakan antara DLH dengan masyarakat dan mitra secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih optimal daripada dikerjakan sendiri sendiri. DLH sebagai pengelola kebijakan pengelolaan sampah harus bisa berkoordinasi dengan mitra pengangkut sampah dan masyarakat agar proses pengangkutan sampah berjalan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan, seperti memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke TPA. Namun, koordinasi antara DLH dengan mitra dan masyarakat rumah tangga masih kurang, terbukti dari masih adanya sampah yang dibawa oleh mitra pengangkut sampah ke TPA dalam posisi belum dipilah sehingga dapat meningkatkan volume sampah di TPA. Hal tersebut didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH Boyolali, yakni Bapak Sarju yang menyatakan bahwa sejauh ini sampah yang dibawa ke TPA dari mitra pengangkut sampah sebagian masih dalam kondisi belum dipilah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah mengkomunikasikan kepada mitra dan masyarakat rumah tangga berupa himbauan untuk memilah sampahnya sebelum dibawa ke TPA sehingga tidak meningkatkan volume sampah di TPA Winong, namun pada kenyataannya sebagian sampah yang dibawa pengangkut ke TPA Winong masih belum dipilah. Hal tersebut didukung dengan gambar 1.5 dibawah yang menunjukkan bahwa mitra mengangkut sampah yang belum dipilah, yakni masih dalam posisi di dalam plastic-plastik dan karung-karung yang langsung di angkut dari masyarakat.



Gambar 1. 5 Pengangkutan sampah oleh mitra

Menurut pendapat Kepala DLH Boyolali yang dikutip dari detikJateng (2024), pengurangan sampah harus dilaksanakan mengingat TPA yang ada sudah tidak mampu menampung sehingga kemudian bank sampah yang ditujukan supaya kemampuan pengurangan sampah dari sumbernya, yaitu masyarakat rumah tangga dapat berjalan maksimal. Akan tetapi, komunikasi antara DLH Boyolali dengan bank sampah juga masih kurang mengingat komunikasi hanya dilakukan melalui *WhatsApp*. Hal tersebut berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kabid pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup DLH Boyolali yang menyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan forum bank sampah hanya melalui *WhatsApp*, padahal apabila komunikasi bisa berjalan dengan baik dan bisa memanfaatkan *platform online* maka forum tersebut dapat digunakan bagi yang membutuhkan untuk menjual sampah agar harga tidak dipermainkan. Selain itu, keberadaan bank sampah yang diharapkan bisa menjadi solusi agar masyarakat rumah tangga menjadi mau dan tertarik untuk memilah sampah di Kabupaten Boyolali ini juga masih terbatas. Pada tahun 2024, dari 206 bank sampah di Kabupaten Boyolali, bank sampah yang aktif sebanyak 109 bank sampah.

Selain itu, TPS3R yang diharapkan dapat membantu DLH dalam mengurangi sampah masih minim keterlibatannya, dimana dari 15 TPS3R yang ada, hanya 4 TPS3R yang aktif seperti yang bisa dilihat pada tabel 1.3 di bawah.

Tabel 1. 4 Data TPS3R Kabupaten Boyolali 2024

No	Nama TPS3R	Kondisi
1	TPS3R Doplang	Tidak Aktif
2	TPS3R Jeron Berseri	Aktif
3	TPS3R Randusari	Tidak Aktif
4	TPS3R Tawangsari	Tidak Aktif
5	TPS3R Tumang	Aktif
6	TPST Sendang	Tidak aktif
7	TPS3R Urutsewu	Tidak Aktif
8	TPS3R Dibal	Tidak Aktif
9	TPS3R Resik	Aktif
10	TPS3R Jatirejo	Tidak Aktif
11	TPS3R Tegalorejo	Tidak Aktif
12	TPS3R Kismoyoso	Aktif
13	TPS3R Butuh 2	Pembangunan
14	TPS3R Rembun	Tidak Aktif
15	TPS3R Gombang	Pembangunan

Sumber: DLH Boyolali

Berdasarkan tabel 1.4 Data TPS3R Kabupaten Boyolali 2024, dapat dijelaskan bahwa DLH telah membangun sejumlah TPS3R, namun tidak semua TPS3R dikelola secara aktif oleh masing-masing desa yang mengartikan bahwa masih minimnya koordinasi antara DLH dengan pengelola TPS3R.

Sinergitas antar *stakeholders*, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, mitra dan masyarakat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dan dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Agar lebih memahami fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali maka penelitian ini

akan menganalisis sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali.

1.2 Pertanyaan penelitian

Mengapa sinergitas antar stakeholders dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali belum optimal?

1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang ditemukan dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Boyolali pada kurun waktu 4 tahun terakhir.
2. Masih kurangnya keterlibatan TPS3R dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dimana dari 15 TPS3R yang ada, yang aktif hanya 4 TPS3R.
3. Masih kurangnya keterlibatan bank sampah dalam pengelolaan sampah dimana dari 206 bank sampah, hanya 109 yang aktif.
4. Koordinasi antara DLH dan masyarakat masih kurang, terbukti dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimana masyarakat masih membuang sampah sembarangan di bantaran sungai.
5. Kurangnya interaksi antara masyarakat rumah tangga dan DLH terbukti dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program DLH dalam melakukan pemilahan sampah dari rumah dimana sampah yang dibawa ke TPA masih dalam kondisi belum dipilah.

6. Koordinasi antara DLH dengan mitra dan masyarakat masih kurang karena sebagian sampah yang diangkut mitra pengangkut sampah ke TPA belum berupa residu sehingga dapat meningkatkan volume sampah di TPA.

Rumusan masalah

Berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini bisa dirinci sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan, mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru di bidang ilmu sosial, khususnya administrasi publik yang relevan dengan fokus dan lokus penelitian.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi, khususnya birokrat dalam pemerinthan. Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Boyolali, khususnya dalam sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Roring et al. (2023) meneliti mengenai sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di pasar Pinasungkulan Kota Manado belum sepenuhnya terjadi dilihat dari aspek pemecahan masalah, peran pemerintah dan dalam penggunaan jaringan komunikasi. Penanganan sampah belum berbasis pada 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan tidak diberikan dukungan sarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado belum memiliki desain, tidak ada SOP dan tidak melakukan pengawasan secara berjenjang tentang penanganan sampah. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado lebih memfokuskan pada tugas penarikan retribusi penyewaan tempat usaha dan retribusi kebersihan serta pendataan pedagang.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Maulidya (2020) yang meneliti tentang sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan sampah di Kota Metro telah melibatkan 5 elemen, yang di antaranya ialah pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta media. Kerja sama antar *stakeholders* telah berjalan baik, namun tidak seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah melaksanakan perannya dengan optimal; (2) komunikasi dan Koordinasi masih kurang, ditunjukkan dengan masih terdapatnya sejumlah keluhan yang berasal dari masyarakat; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah di Kota Metro.

Sudirman et al. (2021) melakukan penelitian tentang sinergi pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan persampahan di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di Pasar Sentral Enrekang dilihat dari 3 dimensi, yaitu dari aspek pemecahan masalah melalui sistem pelayanan persampahan *clean site*, aspek peran pemerintah dalam pengelolaan sampah belum optimal, yaitu peran pemerintah baik kelembagaan, teknik operasional, sistem peraturan dan SOP DLH dan masyarakat, serta aspek jaringan komunikasi dapat dilihat bahwasannya pihak pemerintah, yaitu DLH, Kecamatan, dan petugas kebersihan telah melaksanakan hal tepat dalam bersikap dan melakukan komunikasi dengan masyarakat selama mereka melakukan tugas.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Puspitasari & Anwar (2017) mengenai sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah. Hasilnya menunjukkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat belum tercipta secara baik, pemerintah berjalan sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah serta hanya pihak BLH yang melibatkan pihak masyarakat dalam pengelolaan sampah. Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan mendaur ulang sampah, namun kegiatan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendala dalam pengelolaan sampah terbentur pada lokasi pembuangan akhir (TPA) yang sempit, sedangkan lokasi baru sangat jauh dan tidak ada akses menuju ke TPA.

Penelitian lain dilakukan oleh Krisna Bayu et al. (2019) mengenai sinergitas Pemerintah Desa Tangkas Kecamatan Klungkung dengan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) Darma Winangun untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kerjasama antara Pemerintah Desa Tangkas dengan TPS3R Darma Winangun (Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) terus diupayakan untuk selalu mengajak masyarakat Desa Tangkas agar lebih peduli terhadap permasalahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Komunikasi sudah berjalan baik banyak perubahan yang sudah tercipta dari komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak, sosialisasi dan kebijakan lainnya juga berhasil dilakukan berdasarkan komunikasi yang baik dan efektif. Koordinasi sudah membuahkan hasil, akan tetapi koordinasi yang terjalin kurang mempunyai target jangka waktu yang pendek yang dapat dipakai untuk acuan agar tujuan utama dapat dicapai dengan cepat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Anugerah et al. (2024) mengenai analisis sinergitas aktor *good governance* dalam pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergitas antar aktor *good governance* sudah berjalan dengan baik dengan menjalankan fungsi masing-masing terutama dalam pengelolaan sampah. Konsistensi dan kesadaran para aktor diharapkan supaya

sinergitas dalam pengelolaan kebersihan, khususnya pada pengelolaan sampah supaya dapat mewujudkan Kota Pekanbaru yang Madani.

Penelitian lain dilakukan oleh Sari et al. (2023) mengenai sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan sinergitas *stakeholders* pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri belum dapat berjalan optimal. Dalam pemecahan masalah yang direkomendasikan oleh peneliti, yaitu membuat kaderisasi pengelolaan sampah tiap kecamatan dan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu sekali, serta peran pemerintah, yaitu pemerintah belum mampu untuk menarik investor pada pengelolaan sampah di Kabupaten Kediri. Jaringan komunikasi yang terjalin dalam sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri masih kurang yang mana sosialisasi dilakukan hanya kepada desa atau kecamatan yang siap akan membangun TPS3R dan serta belum dilakukan sosialisasi kepada semua desa yang ada di Kabupaten Kediri terkait dengan pengelolaan sampah.

Tinio et al. (2019) meneliti tentang sinergi dalam sistem pengelolaan sampah padat perkotaan di Kota Malolos, Filipina. Hasilnya menunjukkan bahwa model dinamika sistem yang dibangun menunjukkan sinergi dalam sistem pengelolaan limbah padat perkotaan melalui pameran efek pengalihan limbah (pengomposan dan daur ulang) dan partisipasi publik pada volume limbah yang dibuang. Melalui pengalihan limbah dan partisipasi publik, volume limbah yang dibuang dapat dikurangi dengan peningkatan total penghematan. Penerapan model ke Kota Malolos mengukur nilai tambah dengan penggabungan partisipasi publik - volume limbah padat yang dihasilkan dan limbah yang dibuang lebih rendah dan

total penghematan yang lebih tinggi. Perilaku variabel kunci menggambarkan bahwa dampak pengalokasian anggaran untuk perbaikan teknis seperti fasilitas pengomposan dan daur ulang dapat diperkuat dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap praktik pengelolaan limbah padat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wang et al. (2022) mengenai evaluasi derajat sinergi keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan sampah padat kota terpadu di Harbin, Tiongkok. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi koordinasi oleh berbagai pemangku kepentingan mendorong keadaan sinergis sistem pengelolaan sampah terpadu, dan indikator yang memengaruhi derajat sinergi ditentukan oleh banyak aspek selama proses pengembangan dinamis berdasarkan rangkaian waktu. Juga diamati bahwa meskipun efek sinergis berkembang menjadi kondisi yang teratur antara tahun 2010 hingga 2019, masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal subsistem pemerintah, dan investasi pembuangan sampah terpadu yang diperlukan perlu diperkuat lebih lanjut. Oleh karena itu, banyak kebijakan perlu diterapkan, termasuk memperjelas peran berbagai pemangku kepentingan, menugaskan tugas regional kepada setiap pemangku kepentingan, menganalisis strategi perilaku mereka, dan mendorong keterlibatan mereka. Penelitian ini dapat memberikan referensi ilmiah untuk meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dan memandu pengembangan terkoordinasi tingkat dan kualitas pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

Penelitian lain dilakukan oleh Arsi et al. (2016) mengenai model sinergi antara pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo, Kabupaten Pati. Hasilnya menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan TPA

Sukoharjo sebagai salah satu TPA terbaik di Indonesia, masyarakat harus ikut berperan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun model sinergis antara TPA Sukoharjo dengan masyarakat sekitar. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berdaya, mandiri, dan sejahtera. Dengan demikian, pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan dapat terwujud.

Berikut merupakan rangkuman penelitian terdahulu dalam tabel:

Tabel 1. 5 penelitian terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1	Roring, et al (2023)	Mengetahui Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Sampah di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado	Penelitian ini menggunakan teori dari Rhodes (2007) bahwa terdapat 3 (tiga) aspek mendasar sinergitas, yaitu: Pemecahan Masalah (<i>Problem Solving</i>), Peran Pemerintah (<i>Intergovernmental games</i>) dan Jaringan Komunikasi (<i>Networking</i>).	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif.	Sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di Pasar Pinasungkulan Kota Manado belum sepenuhnya terjadi dilihat dari aspek pemecahan masalah, peran pemerintah dan dalam penggunaan jaringan komunikasi.
2	Maulidya (2020)	Mendesripsikan sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.	Penelitian ini menggunakan teori dari Mulyana (2008) bahwa sinergitas akan berjalan dengan baik jika terbangun komunikasi dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> .	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	(1) pengelolaan sampah di ota Metro sudah melibatkan 5 elemen. Kerjasama antar <i>stakeholders</i> sudah berjalan dengan baik, namun tidak semua <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan sampah menjalankan perannya secara optimal; (2) komunikasi dan Koordinasi masih kurang.

3	Sudirman, et al (2021)	Mengetahui sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanggulangan persampahan di pasar sentral Kabupaten Enrekang.	Penelitian ini menggunakan teori dari Rhodes (2007) bahwa terdapat 3 (tiga) aspek mendasar sinergitas, yaitu: Pemecahan Masalah (<i>Problem Solving</i>), Peran Pemerintah (<i>Intergovernmental games</i>) dan Jaringan Komunikasi (<i>Networking</i>).	Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di pasar sentral Enrekang dilihat dari 3 dimensi, yaitu dari aspek pemecahan masalah melalui sistem pelayanan persampahan <i>clean site</i> , peran pemerintah dalam pengelolaan sampah belum optimal dan aspek jaringan komunikasi sudah tepat.
4	Puspitasari dan Anwar (2017)	Mengetahui bagaimana sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah.	Penelitian ini menggunakan teori dari Najiyati dan Rahmat (2011) bahwa pencapaian sinergitas <i>stakeholders</i> , dapat dikaji menggunakan komunikasi dan koordinasi.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif	Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat belum tercipta dengan baik, pemerintah berjalan sendiri-sendiri dalam pengelolaan sampah dan hanya BLH yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
5	Krisna Bayu, et al (2019)	Mengetahui sinergitas Pemerintah Desa Tangkas Kecamatan Klungkung dengan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reduce</i> ,	Penelitian ini menggunakan teori dari Najiyati dan Rahmat (2011) bahwa pencapaian sinergitas <i>stakeholders</i> , dapat dikaji menggunakan komunikasi dan koordinasi.	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Komunikasi sudah berjalan baik banyak perubahan yang sudah tercipta, sosialisasi dan kebijakan lainnya juga berhasil dilakukan berdasarkan komunikasi yang baik dan efektif. Koordinasi sudah berbua

		<i>Reuse, Recycle</i>) Darma Winangun untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat			hasil, namun koordinasi yang terjalin kurang memiliki target jangka pendek yang bisa digunakan sebagai acuan agar tujuan utama bisa tercapai lebih cepat.
6	Anugerah, et al (2024)	Menganalisis sinergitas aktor <i>good governance</i> dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.	Menggunakan teori dari Rothstein and Teorell (2008) bahwa ada beberapa indikator keberhasilan untuk menilai tingkat keberhasilan sinergitas, yaitu partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, dan konsensus.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Sinergitas antara aktor <i>good governance</i> sudah terlaksana dengan baik dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Walaupun masalah selalu muncul dengan beragam, pemerintah tetap melakukan evaluasi dengan terobosan-terobosan yang melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
7	Sari, et al (2023)	Mengetahui sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri	Penelitian ini menggunakan teori dari Rhodes (2007) bahwa terdapat 3 (tiga) aspek mendasar sinergitas, yaitu: Pemecahan Masalah (<i>Problem Solving</i>), Peran Pemerintah	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Keberhasilan sinergitas <i>stakeholders</i> pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kediri belum dapat berjalan optimal. Akan tetapi pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan sinergitas

			(<i>Intergovernmental games</i>) dan Jaringan Komunikasi (<i>Networking</i>).		yang ada, yaitu dengan bermitra dari banyak sektor mulai dari pemerintah, antar pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut belum dapat berjalan sebagai semestinya.
8	Tinio, et al (2019)	Mengetahui sinergi dalam Sistem Pengelolaan Sampah Padat Perkotaan di Kota Malolos, Filipina	Penelitian ini menggunakan teori dari Bernardo (2008) yang menyatakan bahwa partisipasi publik dalam praktik pengelolaan sampah berkelanjutan mengurangi produksi sampah.	Metode kualitatif deskriptif	Model dinamika sistem yang dibangun menunjukkan sinergi dalam sistem pengelolaan limbah padat perkotaan melalui pameran efek pengalihan limbah (pengomposan dan daur ulang) dan partisipasi publik pada volume limbah yang dibuang.
9	Wang, et al (2022)	Mengidentifikasi masalah dis-sinergi di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam evolusi manajemen MSW terpadu.	Penelitian ini menggunakan teori dari Hermann Haken (1977) yang menyatakan bahwa tingkat sinergi digunakan untuk menentukan tingkat koordinasi subsistem sinergi manajemen MSW terpadu.	Penelitian kuantitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi koordinasi oleh berbagai pemangku kepentingan mendorong keadaan sinergis sistem pengelolaan sampah terpadu, dan indikator yang memengaruhi derajat sinergi ditentukan oleh banyak aspek selama proses

10	Arsi, et al (2016)	Menemukan model sinergis antara pemerintah masyarakat tentang pengelolaan sampah di TPA Sukoharjo, Kabupaten Pati.	Penelitian ini menggunakan teori dari Sunarwobowo (2008) yang menyatakan bahwa diperlukan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan semua <i>stakeholder</i> , yaitu masyarakat, pemulung, pembuat kompos, pengelola sampah anorganik, dan pemerintah daerah.	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Untuk mencapai keberhasilan TPA Sukoharjo sebagai salah satu TPA terbaik di Indonesia, masyarakat harus ikut berperan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan membangun model sinergis antara TPA Sukoharjo dengan masyarakat sekitar.	pengembangan dinamis berdasarkan rangkaian waktu.
----	--------------------	--	---	--	--	---

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber, 2024

1.5.2 Landasan Teori

Teori bagi peneliti kualitatif berfungsi untuk memandu peneliti dalam mengenali berbagai aspek dari obyek yang diteliti dan menganalisis data yang terkumpul untuk dapat menemukan makna, keunikan, membuat kategorisasi, dan mengkonstruksi hubungan antar kategori. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memungkinkan dan membantu peneliti kualitatif memahami apa yang sudah diketahui secara intuitif pada saat pertama, tetapi pada fase berikutnya bisa berubah sebagaimana teori sosial berubah (Sugiyono, 2019).

1.5.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler & Plano (1988) adalah proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Pasolong (2010) administrasi publik merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau lembaga pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di dalam memenuhi kebutuhan publik dengan cara efektif dan efisien. Kemudian administrasi publik menurut Pfiffner dan Prethus (dalam Syafiie, 2006) merupakan koordinasi upaya individu dan kolektif untuk mengimplementasikan kebijakan publik, hal ini terutama mencakup operasi pemerintahan sehari-hari.

Pengelolaan sampah merupakan domain publik yang berada dalam administrasi publik. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana, sedangkan pelaksanaan pengelolaan sampah dapat melibatkan pihak ketiga dan masyarakat. Pengelolaan sampah dalam

administrasi publik meliputi kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk mengurangi dan menangani sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) mengatur bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah dilakukan dengan membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah. Penanganan sampah, yaitu memilah sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat sampah. Beberapa peraturan pemerintah yang mendukung pengelolaan sampah, di antaranya, yaitu PP No. 81 Tahun 2012 dan PP No. 27 Tahun 2020.

1.5.2.2 Manajemen Publik

Menurut Ghofur (2014), manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Shafriz dan Russel (dalam Keban, 2004) menyatakan bahwa manajemen berkenaan dengan orang yang bertanggungjawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu pemanfaatan sumberdaya (seperti orang dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen publik dalam pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari manajemen publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membiayai penyelenggaraan

pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, produsen, dunia usaha, dan masyarakat. Pengelolaan sampah mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Dalam pengelolaan sampah, setiap orang diwajibkan untuk memilah sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, yaitu 3R (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu tantangan utama dalam manajemen publik adalah menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat.

1.5.2.3 Manajemen *Stakeholders*

Manajemen stakeholders merupakan konsep penting dalam ranah operasi bisnis dan organisasi, yang berkisar pada identifikasi, analisis, dan pembinaan hubungan dengan individu atau kelompok yang akan terpengaruh oleh, atau memiliki pengaruh terhadap suatu proyek, organisasi, atau kebijakan. Tujuan utama manajemen pemangku kepentingan adalah untuk memastikan bahwa tujuan dan pelaksanaan proyek selaras dengan kebutuhan dan harapan semua pemangku kepentingan. Pada dasarnya, hal ini melibatkan pengakuan semua pemangku kepentingan, menentukan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka, dan mengembangkan strategi untuk melibatkan mereka secara efektif (Cybellium, 2024). Manajemen stakeholder dapat dianggap sebagai strategi manajemen untuk etika dan tanggung jawab sosial dalam organisasi swasta dan publik (Elgar, 2023). *Management stakeholders* adalah suatu pendekatan terhadap *stakeholders* dengan menyesuaikan kondisi stakeholders, yaitu: 1) rekan kerja (*partner*), 2) konsultasi (*consult*), 3) informasi (*inform*), 4) kontrol (*control*) (Viney, 2006).

Viney (dalam Suwitri, 2011) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi dua, yaitu *stakeholders analysis* dan *stakeholders management*, yang membedakan ialah antara pengaruh dan kepentingan dari setiap *stakeholders* individu maupun kelompok. Pengaruh diartikan sebagai besarnya tindakan yang dapat dilakukan *stakeholders* dalam suatu kegiatan. Viney juga menegaskan bahwasannya *stakeholders* dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu:

- a. Primer, yaitu *stakeholders* yang mempunyai pengaruh dan tingkat kepentingan tinggi, untuk melakukan perekrutan pada *stakeholders* kategori ini dengan partner.
- b. Sekunder, yaitu *stakeholders* dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut karegori ini dengan cara consult
- c. Tersier, yaitu *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut *stakeholders* karegori ini dengan cara inform,
- d. Kwarter, yaitu *stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut *stakeholders* kategori ini dengan cara control.

Menurut Wart (1998), terdapat lima sumber sistem nilai yang memengaruhi intensitas dan dominasi hubungan diantara aktor perumus kebijakan publik, yakni: 1) nilai-nilai individu, 2) nilai nilai profesional, 3) nilai-nilai organisasi, 4) nilai-nilai legal, dan 5) nilai-nilai kepentingan publik.

1.5.2.4 Collaborative governance

Ansell & Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai “*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-*

state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets". Pengertian tersebut menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu model pengendalian satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para aktor non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan menyusun atau mengimplementasi kebijakan publik, mengelola program publik dan aset publik.

Emerson et al. (2012) menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri dari; 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan kolaborasi, serta 3) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Dinamika kolaborasi dalam proses kolaborasi merupakan bagian terpenting. Pengungkapan seberapa baik implementasi kolaborasi terdapat pada dinamika, yang didalamnya terdapat prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Adanya kapasitas yang memadai dari para pemangku kepentingan akan menghasilkan tindakan efektif dari beragam hasil dari komponen-komponen lintas fungsional.

1.5.2.5 Stakeholder

Menurut Saidi & Abidin (2003) istilah *stakeholders* biasanya digunakan di kalangan pemerintahan, sedangkan istilah pemangku kepentingan digunakan untuk mendeskripsikan komunitas atau organisasi yang secara permanen menerima dampak dan kebijakan atau aktivitas di mana mereka memiliki kepentingan terhadap hasil kebijakan atau aktivitas tersebut. Pemangku kepentingan adalah perorangan dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam kegiatan atau yang

terkena dampak pelaksanaan kegiatan. Secara garis besar, pemangku kepentingan ialah individu, kelompok, ataupun komunitas serta masyarakat bisa dikatakan sebagai *stakeholders* jika mempunyai karakteristik, yakni memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan pada sebuah isu.

Stakeholder menurut Freeman & Reed (2009) ialah individu atau kelompok yang bisa memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu organisasi sebagai dampak dari kegiatan-kegiatannya. Freeman mengemukakan bahwa *stakeholder* sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya bisa memberikan pengaruh pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Bryson (2001) mengemukakan bahwa *stakeholders* ialah orang, kelompok, atau organisasi apapun yang bisa melaksanakan klaim atau perhatian, sumber daya, atau hasil organisasi, atau dipengaruhi hasil tersebut.

Stakeholder merupakan individu, satu kelompok manusia, masyarakat maupun komunitas yang secara keseluruhan, maupun parsial memiliki hubungan keterkaitan dan kepentingan dalam sebuah program atau aktivitas tertentu yang melibatkannya. Keterlibatan semua *stakeholder* sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sinergi antara mereka dapat membantu mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terkait dengan topik penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengetahui bagaimana sinergi antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi unik yang berkontribusi terhadap pembentukan sinergi yang efektif dalam proses pengelolaan sampah.

1.5.2.6 Sinergitas

Menurut Lasker et al. (2001) sinergi adalah kekuatan untuk mengkombinasikan perspektif, sumber daya, dan keahlian dari kelompok orang-orang atau organisasi-organisasi. Konsep sinergi ialah kekuatan untuk menggabungkan perspektif-perspektif, sumber daya, serta keahlian dari sekelompok orang ataupun organisasi. Menurut Deardorff & Williams (2006), sinergi adalah sebuah proses di mana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Pamudji (1985) menyatakan bahwa pada hakikatnya sinergi mengindikasikan adanya dua faktor atau dua pihak lebih yang berinteraksi menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Terdapat tiga unsur dalam bersinergi, yaitu adanya dua pihak atau lebih, terdapatnya unsur interaksi, serta terdapatnya unsur tujuan bersama. Menurut Simmel, seorang filsuf dan sosiolog asal Jerman, interaksi sosial memiliki tiga unsur pokok, yaitu: individu-individu yang terlibat dalam interaksi, isi atau konten dari interaksi, dan bentuk atau pola interaksi.

Sejalan dengan pengertian tersebut, menurut Najiyati & Susilo (2011) sinergitas *stakeholders* diartikan sebagai suatu kombinasi unsur-unsur, serta bagian yang dapat menghasilkan *output* atau keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sinergitas dapat terbentuk melalui beberapa cara. Menurut Najiyati & Susilo (2011) proses sinergitas tersebut terjadi dengan melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang baik diantara *stakeholders*. Komunikasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa

adanya koordinasi, dan begitupun sebaliknya, koordinasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi di dalamnya.

a. Komunikasi

Komunikasi menurut Lasswell (dalam Effendy, 2000) merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi menurut Laswell (dalam Mulyana, 2008), yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan juga efek. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, pesan yang disampaikan komunikator harus dapat dimaknai dan dimengerti oleh komunikan. Menurut Hardjana (2003), komunikasi dikatakan efektif apabila memenuhi syarat di antaranya, yaitu:

- a) Pesan dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim pesan. Hal ini menjadi aspek untuk mengukur komunikasi yang efektif jika makna pesan yang dikirim oleh komunikator dapat dipahami oleh komunikan.
- b) Pesan ditindaklanjuti dengan suatu tindakan sukarela oleh penerima pesan. Komunikan memberikan tindaklanjutan atas pesan yang telah diterimanya secara sukarela serta tidak terpaksa.
- c) Dapat meningkatkan kualitas hubungan antar stakeholder. Komunikasi yang efektif cenderung akan mendorong terjadinya hubungan yang positif antar stakeholder yang melakukan komunikasi. Hal itu disebabkan oleh pihak yang melaksanakan komunikasi merasa mendapatkan manfaat dari komunikasi yang dilakukan tersebut sehingga merasa harus menjaga hubungan antar

stakeholder. Dalam konteks sinergitas *stakeholder* yang dimaksud adalah antar organisasi, akan tetapi komunikasi dijalankan oleh individu yang mewakili organisasi tersebut sehingga kualitas hubungan interpersonal antara perwakilan organisasi memiliki dampak langsung terhadap kelancaran kerja sama.

- d) Tidak ada hambatan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang efektif dapat dilihat dari tidak adanya penghambat dalam berkomunikasi sehingga komunikasi tetap dapat berjalan dengan lancar.

Mulyana (2008) menyatakan bahwasannya komunikasi bisa dikatakan efektif apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a) Pesan diterima dan dipahami dengan apa adanya seperti yang dimaksudkan.
- b) Pesan akan berlanjut dengan adanya perbuatan oleh komunikan.
- c) Dapat meningkatkan keberlangsungan hubungan komunikator dan komunikan.

Pengertian komunikasi menurut Sofyandi & Garniwa (2007), bisa dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

- a) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada sumber menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan.
- b) Pengertian komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

b. Koordinasi

Selain adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas perlu memperhatikan aspek koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan oleh Hasan (2005) bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Koordinasi diperlukan agar tugas-tugas bisa dilakukan serta sumber-sumber yang bisa digunakan secara efektif dan efisien. Silalahi (2011) mengemukakan bahwa koordinasi ialah integrasi dari aktivitas-aktivitas individual dan unit-unit pada satu usaha bersama, yakni bekerja mengarah pada tujuan bersama. Syamsi (1994) menyatakan bahwa koordinasi terdiri dari usaha dalam bekerjasama yang selaras dan tertib untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Unsur koordinasi menurut James D. Mooney (dalam Syafiie, 2011) adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok (*orderly arrangement of group effort*), kesatuan tindakan (*unity of action*), serta tujuan bersama (*common purpose*). Menurut Handyaningrat (dalam Aprilianto, 2016) koordinasi memiliki kriteria berikut:

- a) Kesepakatan dan komitmen. Berkaitan pada terdapatnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta terdapatnya bentuk kesepakatan ataupun kesesuaian kehendak diantara pihak.
- b) Kompetensi pihak-pihak yang terlibat, berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, sikap, semangat kerja, dan kompetensi *stakeholders* yang dapat bermanfaat positif bagi pelaksanaan program.
- c) Adanya kesadaran dari pihak-pihak yang terlibat, berkaitan dengan tanggung jawab pelaksana terhadap hasil koordinasi. *Stakeholders* dengan kesadaran

tinggi, cenderung selalu bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

- d) Kontinuitas atau berkelanjutan, berkaitan dengan koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, seiring dengan perubahan di lingkungan.

Sugandha (1991) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada usaha koordinasi di antaranya terdiri dari:

- a) Unit-unit atau organisasi-organisasi
- b) Sumber-sumber (potensi)
- c) Kesatupaduan
- d) Gerak kegiatan
- e) Keserasian
- f) Arah yang sama (sasaran)

Menurut Ndraha (2015) indikator untuk menganalisis koordinasi, yaitu:

- a) Informasi, komunikasi, dan teknologi. Informasi merupakan rangkuman data dalam pengambilan keputusan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Sedangkan teknologi merupakan sistem yang berbasis pada penggunaan komputer untuk membantu jalannya koordinasi.
- b) Kesadaran pada pentingnya koordinasi dari tiap pihak yang terkait, hal tersebut bisa dilihat dari berjalannya komunikasi di antara berbagai pihak.
- c) Kompetensi *stakeholders*, dilihat dari adanya keterlibatan aktor atau pejabat berwenang sesuai dengan bidang pembangunan yang berlangsung.

- d) Kesepakatan dan komitmen, kesepakatan merupakan kunci koordinasi agar tetap berjalan searah untuk mencapai tujuan.
- e) Penetapan kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koordinasi.
- f) Insentif koordinasi, yaitu adanya sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan bersama.
- g) Feedback ialah umpan balik yang terlihat pada proses suatu koordinasi.

Doctoroff (1977) mengemukakan bahwasannya terdapat sejumlah aspek bagi suatu sistem sinergi sehingga dapat dikatakan sebagai sinergi yang ideal. Syarat tersebut, yaitu komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.

a. Komunikasi yang efektif

Doctoroff (1977) menyatakan komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik baik skala individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Dalam komunikasi yang efektif terdapat syarat berupa kesamaan pemahaman pada objek yang dilakukan pembahasan di antara komunikator dengan komunikan. Devito (2011) menyatakan bahwa komunikasi yang efektif disebabkan adanya pengertian, dapat menyebabkan kesenangan, mempengaruhi sikap, menjalin keberlangsungan sosial yang baik, dan harapannya tercipta suatu perilaku.

b. Umpan balik yang cepat

Doctoroff (1977) menyatakan bahwa organisasi saat ini biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik yang cepat. Hal ini karena umpan balik harus mengikuti hierarki yang ada dalam organisasi

tersebut sehingga biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam sistem sinergi yang ideal bisa terhambat apabila ada hambatan pada pemberian umpan balik. Oleh karena itu, umpan balik dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan komunikasi dan sinergi yang terjalin dalam suatu organisasi.

c. Kepercayaan

Menurut Doctoroff (1977), kepercayaan saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah. Kepercayaan dimulai dengan membuka diri kita terlebih dahulu dapat dipercaya. Untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu harus memiliki keinginan untuk saling terbuka. Kepercayaan menurut Bilondatu (2013) merupakan keyakinan satu pihak mengenai maksud dan perilaku pihak yang lainnya. Johnson (dalam Putri & Kusumaputri, 2014) menyatakan bahwa kepercayaan meliputi lima aspek, yakni:

- a) Keterbukaan (*openness*), yang meliputi kesedian seseorang agar membagikan ide, informasi, pendapat, perasaan maupun reaksi terhadap apa yang sedang dialaminya.
- b) Berbagi (*sharing*), yaitu kesediaan individu untuk menyumbangkan ketrampilan serta sumber dayanya bagi keberhasilan tujuan bersama.
- c) Penerimaan (*acceptance*), yaitu kapasitas agar terlibat di percakapan bersama orang lain serta untuk menghormati perspektif mereka tentang suatu topik.

- d) Dukungan (*support*), yakni komunikasi individu dengan orang lain yang menumbuhkan keyakinan bahwa orang lain mampu secara efektif mengelola situasi yang terjadi.
- e) Bekerja sama (*cooperative intentions*), yaitu mencakup harapan individu untuk bekerja sama serta harapan bahwa orang lain akan bekerja sama agar meraih tujuan bersama.

d. Kreativitas

Munandar (2009) menyatakan bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang dapat menyelesaikan masalah.

Rhodes (dalam Munandar, 2009) menyatakan bahwa definisi kreativitas dapat ditinjau dari empat aspek atau disebut dengan istilah *Four P's of Creativity*, yaitu:

- a) Pribadi (*Person*), ialah perilaku kreatif yang nampak dari kekhasan seluruh kepribadian pada interaksi dengan lingkungannya.
- b) Proses (*Process*), yaitu proses berpikir kreatif untuk menghasilkan suatu gagasan yang inovatif.
- c) Produk (*Product*), yaitu kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru.
- d) Pendorong (*Press*), yaitu dorongan internal dari dalam diri maupun eksternal dari lingkungan yang memengaruhi untuk menciptakan gagasan dan produk baru.

Menurut Rhodes (2007), kunci dari berhasilnya sinergi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek mendasar, yaitu:

a. Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Pemecahan masalah, yaitu kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita juga dan proses yang dapat membantu dalam menemukan keinginan mereka serta bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah.

b. Peran Pemerintah (*intergovernmental games*)

Peran pemerintah, yakni terpadunya interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta serta masyarakat.

c. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi menurut Siregar et al. (2021) menjelaskan bahwa struktur organisasi akan sangat menentukan jaringan atau pola komunikasi organisasi. Dalam organisasi yang dikendalikan secara terpusat disekitar orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki posisi atau jabatan penting saja.

Sinergitas dalam pengelolaan sampah merujuk pada kerja sama yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Sinergitas ini penting untuk menciptakan sistem yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya sinergi yang baik, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi

tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan upaya kolektif yang menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sinergitas ini dapat meningkatkan kesadaran, efisiensi, dan dampak positif terhadap lingkungan, menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, komunikasi dan koordinasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan semua pihak dalam pengelolaan sampah sehingga menghasilkan sinergitas yang kuat dan berkelanjutan. Sinergitas dapat meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Dalam mengidentifikasi faktor pendukung sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali peneliti menggunakan dua aspek sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi. Alasan peneliti menggunakan dua aspek tersebut dalam mengidentifikasi faktor pendukung sinergitas ialah karena dari ketiga teori sinergitas tersebut ketiganya menyebutkan bahwa salah satu aspek sinergitas ialah komunikasi. Kemudian komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa terdapatnya koordinasi. Koordinasi diperlukan supaya tugas-tugas bisa dilaksanakan serta sumber-sumber bisa digunakan dengan efektif serta efisien. Komunikasi dapat menjelaskan bagaimana ketepatan penyampaian dan penerimaan pesan yang terjalin antar *stakeholders*. Kemudian koordinasi dapat menjelaskan bagaimana tugas-tugas dilakukan oleh masing-masing pihak terorganisir secara baik, sesuai pada tanggung jawab dan perannya. Selain itu, meskipun telah dilakukan elaborasi teori sehingga peneliti menggunakan kedua aspek sinergitas tersebut, peneliti tetap terbuka terhadap temuan baru yang muncul dari data lapangan mengingat dalam penelitian kualitatif teori bersifat fleksibel dan dinamis,

teori tidak dianggap sebagai produk akhir yang tetap, melainkan sebagai proses yang terus berkembang, yang dapat berubah seiring berkembangnya pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh. Bahar (dalam Madekhan, 2018) mengemukakan bahwa posisi teori dalam pendekatan kualitatif perlu ditempatkan sesuai pada maksud penelitian yang dikerjakan. Pada penelitian yang bermaksud memperluas teori yang telah ada, teori tersebut memiliki manfaat untuk peneliti pada tiga hal, yang di antaranya;

- a. Penelitian bisa dimulai dari teori terdahulu dengan mengacu kerangka umum teori tersebut. Dengan kata lain, kerangka teoritik yang sudah ada bisa digunakan untuk menginterpretasi dan mendekati data. Namun, penelitian yang saat ini perlu dilakukan pengembangan dengan cara tersendiri terlepas pada teori sebelumnya. Dengan demikian, penelitian dapat bebas memilih data yang dilakukan pengumpulan sehingga memberikan kemungkinan teori awalnya bisa ditambah, diubah, maupun dilakukan modifikasi;
- b. Teori yang telah ada bisa digunakan guna menyusun sejumlah pertanyaan maupun jadi pedoman pada wawancara atau pengamatan guna mengumpulkan data awal; serta
- c. Jika temuan penelitian sekarang beda dengan teori yang telah ada, peneliti bisa memberikan penjelasan mengapa dan bagaimana temuannya beda dengan teori yang ada.

Landasan teori yang dituliskan dalam penelitian ini lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh peneliti memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti walaupun permasalahan tersebut masih bersifat sementara. Oleh sebab

itu landasan teori tersebut bukan harga mati, namun memiliki sifat sementara. Teori yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk menyusun sejumlah pertanyaan atau menjadi pedoman dalam pengamatan/wawancara untuk mengumpulkan data awal dan apabila temuan penelitian sekarang berbeda dari teori yang telah ada maka peneliti bisa menjelaskan bagaimana dan mengapa temuannya berbeda dengan teori yang telah ada.

1.5.2.7 Pengelolaan Sampah

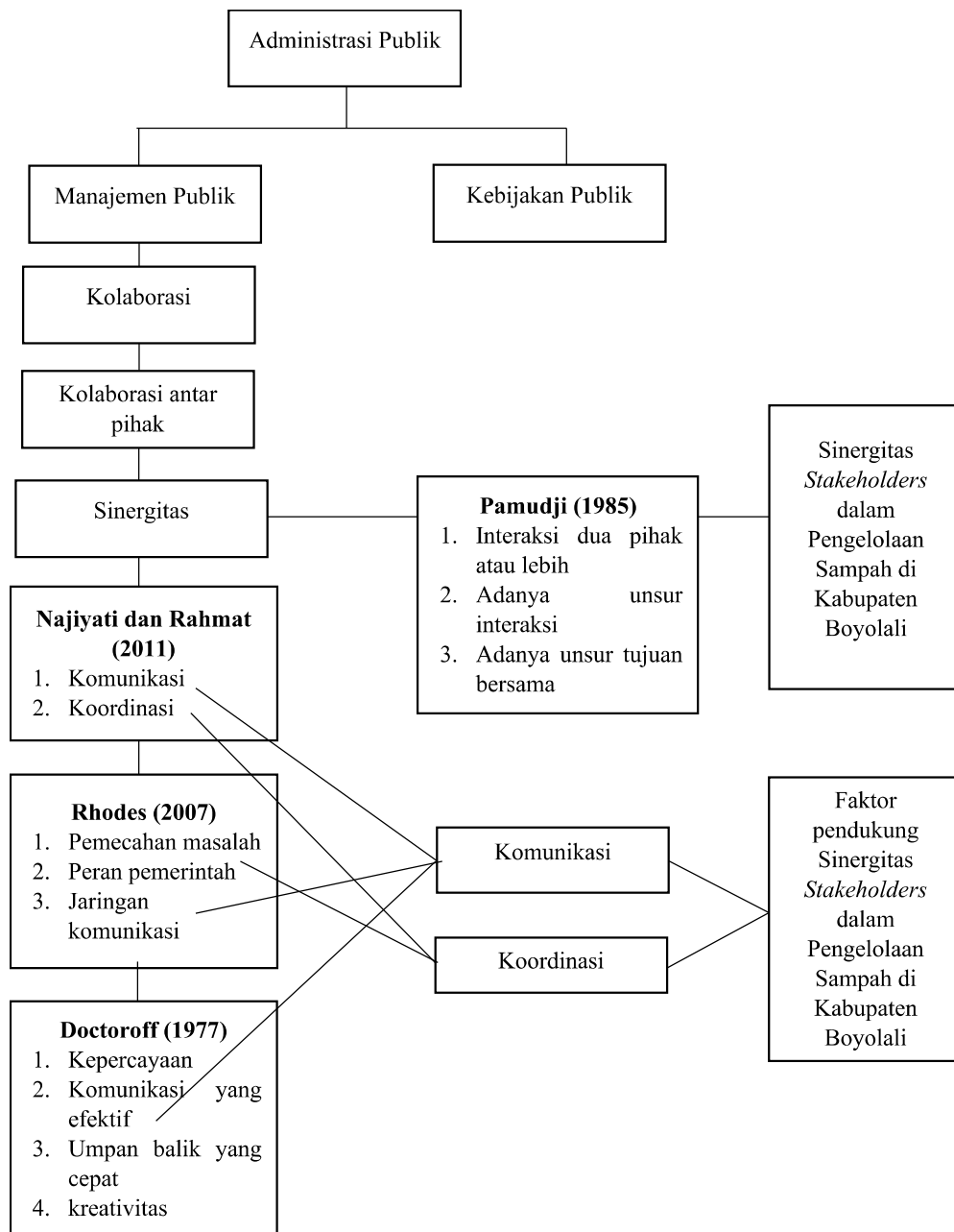
Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2008 yang dimaksud sampah ialah sisa aktivitas sehari-hari manusia serta proses alam yang memiliki bentuk padat. Pengelolaan Sampah menurut Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2021 merupakan aktivitas yang sistematis, keseluruhan, dan memiliki kesinambungan meliputi kegiatan penanganan dan pengurangan Sampah. Tujuan Pengelolaan Sampah dalam Peraturan ini ialah:

- a. Mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kabupaten Boyolali. Pemerintah Daerah Boyolali memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Pengolahan sampah di Kabupaten

Boyolali meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi; dan/atau daur ulang energi.

1.7 Kerangka Teori



Gambar 1. 6 Kerangka Teori

Sumber: Peneliti, 2025

Berdasarkan gambar 1.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukan diskursus teori secara mendalam terhadap berbagai pendekatan konseptual yang relevan, peneliti menetapkan dua indikator dalam mengidentifikasi faktor pendukung sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali peneliti menggunakan dua aspek sinergitas, yaitu komunikasi dan koordinasi. kedua indikator tersebut digunakan karena dianggap paling representatif dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Meskipun telah dilakukan diskursus teori sehingga peneliti menggunakan kedua aspek sinergitas tersebut, peneliti tetap terbuka terhadap temuan baru yang muncul dari data lapangan mengingat dalam penelitian kualitatif teori bersifat fleksibel dan dinamis, teori tidak dianggap sebagai produk akhir yang tetap, melainkan sebagai proses yang terus berkembang, yang dapat berubah seiring berkembangnya pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh.

1.8 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dilandaskan pada filsafat postpositivisme, dilakukan guna meneliti dalam kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya ialah eksperimen) yang mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara triangulasi data atau gabungan, analisis data memiliki sifat kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menegaskan arti dibanding generalisasi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif pada penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan

informasi mengenai sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali. Alasan peneliti menggunakan metode ini ialah sebab peneliti hendak mendeskripsikan kondisi yang akan diamati di lapangan dengan lebih mendalam dan spesifik. Penelitian ini berupaya menggambarkan suatu kondisi sehingga data yang dikumpulkan memiliki sifat deskriptif. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pada pelaksanaan penelitiannya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dari peneliti mengungkap keadaan sebenarnya terkait dengan objek yang akan dilakukan penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah berada di Kabupaten Boyolali.

1.7.3 Fenomena Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengidentifikasi dan menganalisis sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali serta faktor pendukung sinergitas *stakeholder* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali yang belum optimal. Fenomena yang terdapat dalam sinergitas *stakeholder* dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali diantaranya, yakni sinergitas *stakeholder*, komunikasi dan koordinasi. Adapun penjelasan fenomena-fenomena tersebut:

1. Sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah, yaitu adalah proses interaksi antar *stakeholder*, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, mitra DLH, bank sampah, TPS3R, paguyuban guyub rukun,

kelompok Homepimpah, pengepul dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan lingkungan yang baik, bersih, dan sehat.

2. Faktor pendukung sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali yang dilihat dari:

2.1 Komunikasi, yaitu komunikasi antar *stakeholders* yang teribat dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud pengirim, pesan dapat ditindaklanjuti oleh penerima, dan pesan dapat meningkatkan hubungan.

2.2 Koordinasi, yaitu usaha yang berkelanjutan di antara para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam rangka tercapainya tujuan dengan mengerahkan kompetensi *stakeholder* yang didukung oleh kesadaran dan komitmen setiap *stakeholder*.

Berikut ini merupakan tabel fenomena penelitian:

Tabel 1. 6 Fenomena dan Gejala Penelitian

Konsep	Fenomena	Gejala yang diamati
1. Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu adalah proses interaksi antar <i>stakeholder</i> , yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, mitra DLH, bank sampah, TPS3R, paguyuban guyub rukun, kelompok Homepimpah, pengepul dan masyarakat untuk	1. Sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah rumah tangga	1. Interaksi dua pihak atau lebih a. Perlibatan dua <i>stakeholders</i> atau lebih 2. Adanya unsur interaksi b. Individu-individu yang terlibat dalam interaksi c. Isi interaksi d. Pola interaksi

mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan lingkungan yang bersih, dan sehat.		3. Adanya unsur tujuan bersama a. Kesamaan tujuan b. Tujuan yang disepakati bersama
2. Faktor pendukung sinergitas <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Boyolali yang dilihat dari: 2.1 Komunikasi, yaitu komunikasi antar <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan sampah dapat dikatakan efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana yang dimaksud pengirim, pesan dapat ditindaklanjuti oleh penerima, dan pesan dapat meningkatkan hubungan.	2. Komunikasi	1. Pesan dapat diterima dan dimengerti a. Kejelasan pesan b. Pemahaman bersama 2. Pesan ditindaklanjuti a. Respon setelah menerima pesan b. Implementasi informasi 3. Meningkatkan kualitas hubungan antar <i>stakeholder</i> a. Kepercayaan antar pihak b. Intensitas komunikasi 4. Media komunikasi a. Jenis media yang digunakan b. Efektivitas media

2.2 Koordinasi, yaitu suatu proses yang berkelanjutan di antara para <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sampah dalam rangka tercapainya tujuan dengan mengerahkan kompetensi <i>stakeholder</i> dan didukung oleh kesadaran dan komitmen setiap <i>stakeholder</i>.	3. Koordinasi	1. Keberlanjutan a. Koordinasi dilakukan secara berkala 2. Tujuan koordinasi a. Keselarasan antara pihak b. Kesamaan terhadap tujuan 3. Kompetensi a. Kemampuan stakeholders 4. Kesadaran a. Tanggung jawab stakeholders b. Kepedulian pentingnya koordinasi 5. Komitmen a. Pembagian tugas yang jelas b. Kesiapan menjalankan hasil koordinasi
--	----------------------	---

Sumber : Peneliti

1.7.4 Jenis dan sumber data

Arikunto (2013) mengemukakan pengertian dsri sumber data di penelitian sebagai subjek dari mana atau asal data bisa didspatkan. Dalam hal ini untuk melengkapi data penelitian diprlukan dua sumber data, yakni:

1. Data Primer

Data primer didefinisikan oleh Sugiyono (2019) sebagai sumber data yang didapatkan oleh peneliti lngsung dari sumber asli. Dalam penelitian ini yang

menjadi sumber data primer adalah diperoleh dari hasil wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

Data sekunder didefinisikan oleh Sugiyono (2019) sebagai sumber data yang didapatkan peneliti dengan cara tidak langsung, yakni dengan perantara yang didapatkan serta dilakukan pencatatan oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh secara tidak langsung melalui sumber data yang berasal dari kajian-kajian terdahulu, seperti misalnya jurnal ilmiah, literatur, dan website pemerintah yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

1.7.5 Pemilihan informan

Moleong (2006) mengemukakan bahwa informan penelitian merupakan seseorang yang berguna dalam pemberian informasi terkait keadaan dan suasana latar belakang dari suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik penentuan informan berupa teknik *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel melalui pertimbangan tertentu di mana pertimbangan tersebut contohnya ialah orang itu dianggap paling mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti, ataupun kemungkinan orang itu merupakan penguasa hingga bisa memberikan kemudahan peneliti melakukan penjelajahan objek atau keadaan yang dilakukan penelitian. *Sampling incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2019). *Snowball*

sampling merupakan teknik pengambilan sumber data yang di mana awalnya berjumlah sedikit kemudian jadi membesar, hal tersebut disebabkan sumber data sedikit tersebut belum mampu memberi data yang memuaskan maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2019).

Tabel 1. 7 Pemilihan Informan

No	Informan	Jumlah	Teknik	Alasan
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali	1	<i>Purposive Sampling</i>	Orang tersebut paling mengetahui sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupten Boyolali
2	Kepala Sub Koordinator Pengelolaan Sampah	1	<i>Purposive Sampling</i>	Orang tersebut paling mengetahui pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali
3	Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten Boyolali	1	<i>Purposive Sampling</i>	Orang tersebut paling mengetahui mengenai pengelolaan bank sampah di Kabupaten Boyolali
4	Masyarakat pengelola bank sampah	1	<i>Snowball sampling</i>	Arahan dari ketua forkom bank sampah
5	Ketua Kelompok Homepimpah	1	<i>Snowball sampling</i>	Arahan dari DLH
6	Pengepul sampah	1	<i>Snowball sampling</i>	Arahan dari ketua kelompok Homepimpah
7	Masyarakat rumah tangga		<i>Snowball sampling</i>	Arahan dari mitra
8	Mitra yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Mandiri	2	<i>Sampling incidental</i>	Peneliti datang ke TPA dan mewawancarai mitra secara kebetulan.

Sumber: Peneliti, 2025

1.7.6 Instrumen Penelitian

Sugiyono (2019) mengemukakan instrumen penelitian sebagai suatu alat yang digunakan dalam melaksanakan pengukuran fenomena alam ataupun fenomena sosial yang dilaksanakan pengamatan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, yakni peneliti sendiri sebagai instrumen utama penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Sugiyono, 2019) yang mengemukakan bahwasannya pada penelitian yang bersifat kualitatif yang jadi alat ataupun instrumen penelitian merupakan peneliti itu sendiri sebab tidak melaksanakan pengukuran, melainkan eksplorasi guna penemuan. Sebagai instrumen utama penelitian, peneliti juga diberi dukungan instrumen lain guna mendapatkan data yang berbentuk pedoman melakukan wawancara terkait sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan sampah. Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung, yakni alat perekam suara, alat fotografi, dan alat tulis.

1.7.7 Teknik pengumpulan data

Sugiyono (2019) mendefinisikan teknik pengumpulan data sebagai langkah terutama pada suatu penelitian sebab tujuan yang utama pada penelitian ialah memperoleh data dan jika tidak tahu teknik pengumpulan data, peneliti tak bisa mendapat data yang terpenuhi standarnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Esteborg (dalam Sugiyono, 2019) mendefinisikan wawancara sebagai bertemunya dua orang guna menjalankan pertukaran informasi serta gagasan

melalui tanya jawab hingga dapat dilakukan konstruksi arti pada sebuah topik tertentu. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dengan tanya jawab bersama informan di mana sebelumnya sudah dilakukan penyusunan pertanyaan oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas manusia dengan menggunakan alat bantu utama, yaitu pancaindra mata. Oleh karena itu, observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi ke lokasi penelitian, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dan wilayah terkait lainnya, seperti di TPA Winong, Mitra DLH, pengepul, dan beberapa Bank Sampah di Kabupaten Boyolali.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa dokumen adalah catatan kejadian yang telah terlewat dan dalam bentuk gambar, tulisan, maupun hasil karya monumental yang berasal dari seseorang. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang digunakan peneliti, yaitu peraturan, artikel, jurnal, dan dokumen-

dokumen terkait sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan smpah rumah tangga di Kabupaten Boyolali.

1.7.8 Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles. et al. (2014), yakni dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kondensasi data

Kondensasi data, yaitu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, penguraian, dan atau transformasi data yang muncul secara utuh dari catatan tertulis lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data lebih kuat. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini ditujukan untuk memadatkan data yang didapat dan diolah menjadi hasil penelitian yang kuat.

b. Penyajian data

Secara umum, penyajian adalah kumpulan informasi terkompresi dan terorganisir yang memungkinkan pengambilan gambar dan tindakan. Dengan melihat tampilan akan membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu, baik menganalisis lebih jauh atau

mengaambil tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam kegiatan penyajian data, peneliti harus melakukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai kesamaan kategori yang selaras pada masalah yang dirumuskan pada kajian. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya dituliskan dalam bentuk narasi dan bisa jadi dilengkapi gambar, matriks, grafik, tabel dan pelengkap lainnya agar analisis data lebih jelas, kuat, dan mudah untuk dipahami.

c. Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah kesimpulan dan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan maksud pola, penjelasan, arus sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan final mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data telah selesai, tergantung pada ukuran catatan lapangan; cara pengkodean, penyimpanan, serta pengambilan yang dipergunakan; kecanggihan peneliti; serta jangka waktu yang perlu dipenuhi. Sebuah simpulan akhir atau final lebih baik apabila dibuat dengan singkat dan jelas supaya mudah dimengerti.

Selain itu, analisis data dalam penelitian ini juga dibantu dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti. Aplikasi ini membantu dalam membuat data hasil penelitian agar menjadi terstruktur dengan baik, efektif, dan sistematis. Aplikasi ini dapat membantu peneliti mengelola data mentah menjadi data yang lebih sistematis dan dapat dipahami. Contohnya adalah mengubah hasil wawancara ke kutipan yang kemudian akan ditandai ke dalam daftar kode yang relevan sehingga dapat

membantu menganalisis data wawancara. Atlas.ti dirancang untuk membantu peneliti menganalisis secara sistematis data yang kompleks baik itu berupa teks maupun multimedia. Atlas.ti dapat membantu peneliti mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur.

1.7.9 Keabsahan Data

Keabsahan data ditujukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Creswell (2015) mengemukakan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ialah bentuk usaha untuk melakukan penilaian akurasi dari berbagai temuan, sebagaimana yang dideskripsikan dengan baik oleh peneliti ataupun partisipan.

Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan metode *peer debriefing*. *Peer debriefing* adalah kegiatan yang memberikan hasil poin penting bagi analisis data serta membantu mengungkap pendorong dan penghambat pada implementasi kebijakan publik (Suwitri, 2011). Menurut Satori & Komariah (2014), *peer debriefing* adalah proses diskusi dengan rekan sejawat yang paham akan penelitian yang dilakukan untuk mengurangi subjektivitas dalam menganalisa dan mengolah data. *Peer debriefing* dalam penelitian dilakukan peneliti dengan mendiskusikan masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali dengan Mantan Kepala Bidang Pengelolaan sampah DLH Kabupaten Boyolali yang pernah menjabat. Adapun alasan peneliti memilih informan tersebut karena orang tersebut memiliki pengalaman dalam

pengelolaan sampah di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu yang lama sebelum masa pensiunnya.